

Analisis *Value for Money* dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Aini Kurnia *¹
Ceisya Amaro ²
Alinda Thalia ³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*e-mail: ainikurnia20@gmail.com ¹, ceisyaa06@gmail.com ², alindathalia89@gmail.com ³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep *Value For Money* (VFM) diterapkan dalam mengukur kinerja keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dari tahun 2022-2023 dengan menggunakan tiga komponen utama kinerja keuangan publik (VFM), yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi laporan keuangan realisasi anggaran belanja dan pendapatan BKPK, serta laporan kinerja BKPK tahun 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis pada tahun 2022 kurang ekonomis dan pada tahun 2023 ekonomis, sehingga tingkat rata-rata rasio ekonomis tahun 2022-2023 adalah sebesar 85,72% yang menunjukkan cukup ekonomis. Rasio efisiensi pada tahun 2022-2023 sangat efisien, sehingga tingkat rata-rata rasio efisiensi tahun 2022-2023 adalah sebesar 25,11% yang menunjukkan sangat efisien. Rasio efektivitas pada tahun 2022-2023 sangat efektif, sehingga tingkat rata-rata rasio efektivitas tahun 2022-2023 adalah sebesar 2.340,7% yang menunjukkan sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang lebih baik di sektor publik, khususnya di bidang kesehatan, sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun terjadi kendala serapan anggaran akibat transisi kelembagaan, BKPK berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pencapaian pendapatan, dengan ruang perbaikan dalam perencanaan dan konsistensi pelaksanaan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Value for Money* dalam pengelolaan anggaran di BKPK telah tercapai dengan cukup optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, *Value For Money*

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the *Value For Money* (VFM) concept is applied in measuring the financial performance of the Health Development Policy Agency (BKPK) from 2022-2023 using three main components of public financial performance (VFM), namely economic, efficiency, and effectiveness. Qualitative descriptive research was used to collect secondary data through documentation of financial reports on the realization of the BKPK budget and revenue, as well as the BKPK performance report for 2022-2023. The results of the study show that the economic ratio in 2022 is less economical and in 2023 it is economical, so that the average level of the economic ratio in 2022-2023 is 85.72% which indicates quite economical. The efficiency ratio in 2022-2023 is very efficient, so that the average level of the efficiency ratio in 2022-2023 is 25.11% which indicates very efficient. The effectiveness ratio in 2022-2023 is very effective, so that the average level of the effectiveness ratio in 2022-2023 is 2,340.7% which indicates very effective. These results indicate that transparency, accountability, and better financial governance in the public sector, especially in the health sector, are very important to achieve sustainable development goals. Despite budget absorption constraints due to institutional transition, BKPK has succeeded in optimizing the use of resources and achieving revenue, with room for improvement in planning and consistency of implementation going forward. This shows that the *Value for Money* principle in budget management at BKPK has been achieved optimally enough to support the achievement of health development goals in a more accountable and sustainable manner.

Keywords: Economic, Effectiveness, Efficiency, *Value For Money*

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan di sektor publik menjadi salah satu aspek penting untuk membantu pembangunan suatu negara, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) adalah lembaga

pemerintah yang memiliki peran besar dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan kesehatan di Indonesia. BKPK mengumpulkan dan mengelola data yang penting untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan merumuskan kebijakan, menyusun strategis, serta mengoordinasikan berbagai program pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengembangan sektor kesehatan adalah elemen dari sistem pengembangan nasional, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesehatan yang baik. Tujuan nasional adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal sebagai bagian dari kemakmuran untuk masyarakat umum, dan tujuan pengembangan sektor kesehatan adalah untuk menyediakan dan meningkatkan layanan kesehatan untuk setiap warga negara. Seperti yang ditunjukkan dalam e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, serta ketersediaan dokter, perawat, dan peralatan medis lainnya (Tampi et al., 2016).

Pengembangan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional, karena sektor kesehatan terus menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini merupakan upaya untuk mencapai kesadaran, motivasi, dan kemampuan untuk melalui kehidupan yang sehat bagi semua populasi untuk menciptakan tingkat kesehatan yang optimal. Pengembangan kesehatan mengharapkan bahwa semua populasi memiliki kapasitas untuk hidup sehat, dan oleh karena itu produksi kualitas akan diproduksi sebagai modal penting untuk pembangunan nasional di masa depan (Pohan & Halim, 2019).

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memiliki peran-peran penting dalam menyusun kebijakan kesehatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya, BKPK perlu mengelola data secara efektif agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Namun, tantangan dalam pengelolaan data sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya dan mengurangi nilai yang dihasilkan. Analisis *value for money* (VFM) dapat membantu menemukan area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Pendekatan ini bertujuan agar setiap dana yang digunakan bisa memberikan hasil terbaik, dengan indikator kinerja tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E).

Menurut Mardiasmo (2009), dalam manajemen sektor publik, konsep *value for money* dibagi menjadi tiga komponen utama: ekonomi (perolehan sumber daya tertentu dengan biaya terendah), efisiensi (hubungan yang ada antara masukan dan keluaran yang dipakai untuk menghasilkan keluaran khusus) dan efektivitas (kaitan antara *output* dan tujuan, yang ditentukan oleh tingkat *output*, strategi, dan tindakan yang diambil untuk mencapainya). Meskipun demikian, indikator nilai uang termasuk dalam dua kategori: indikator alokasi biaya (efisiensi dan ekonomis) dan indikator mutu servis (efektivitas). Konsep nilai uang pasti akan memberikan beberapa hal jika digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Sumber daya dialokasikan secara ekonomis, sumber daya digunakan dengan efisien, dan organisasi berhasil mencapai tujuan (Ekayana & Wirantari, 2024).

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai seberapa bagus suatu perusahaan telah menaati aturan penerapan keuangan. Komponen kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: Laporan laba rugi menunjukkan elemen yang secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan; pendapatan bersih sering dipakai sebagai ukuran kinerja atau selaku dasar untuk ukuran lainnya. Semua hasil ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu melalui kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien disebut kinerja keuangan, yang dapat diukur dengan menganalisis data keuangan yang terlihat dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan harus mencakup hasil yang dapat diukur dan dapat menggambarkan keadaan suatu perusahaan dari berbagai aspek. Untuk mengetahui hasilnya, penilaian kinerja dilakukan (Mendrofa et al., 2024).

Pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu masyarakat menilai sebuah organisasi dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan yang ditawarkannya. sehingga organisasi menjadi lebih baik dan memperbaiki kekurangannya. Pada penelitian sebelumnya, konsep *value for money* (VFM) telah diterapkan pada lembaga sektor publik. Tujuan utama anggaran sektor publik adalah untuk menjadi acuan dan panduan bagi entitas sektor publik dalam

melaksanakan rencananya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum dan sebagai bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas apa yang direncanakan untuk rakyatnya (Syaifanur & Saleh, 2022).

(Habibie et al., 2024) menganalisis VFM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan menemukan bahwa meskipun aspek ekonomi sudah berjalan dengan baik, efektivitasnya masih rendah karena *output* yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan target. Sementara itu, (Permata Sukma & Muslihat, 2023) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa ketiga aspek VFM, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, semuanya berada dalam kategori sangat baik.

Ada banyak hasil penelitian sebelumnya tentang cara penggunaan anggaran di institusi sektor publik, dengan hasil yang berbeda untuk setiap instansi. Hasil ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang konsep *value for money*, yang menganalisis kinerja dengan melihat bagaimana pelaksanaan anggaran diukur dari perspektif ekonomi, efektivitas, dan efisiensi, sehingga setiap uang yang digunakan memiliki nilai atau harga bagi masyarakat (Yuliyanto et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *value for money* (VFM) dalam kinerja keuangan di sektor publik, dengan fokus pada hasil indikator kinerja keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) pada tahun 2022-2023. BKPK dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Menganalisis VFM dalam pengelolaan dana sektor publik merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana, BKPK dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam usaha meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk memberikan bayangan atau deskripsi objektif tentang situasi. Menurut Sugiyono (2020:64), penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan variabel mandiri (variabel yang berdiri sendiri) disebut deskriptif. Penelitian ini tidak membandingkan variabel itu sendiri atau menentukan bagaimana variabel tersebut saling terhubuung satu sama lain. Dengan demikian, istilah "penelitian kualitatif deskriptif" mengacu pada jenis penelitian yang memberikan penjelasan atau gambaran tentang kemajuan di bidang tersebut (Hairani et al., 2023). Tujuan penelitian deskriptif (penelitian deskriptif) atau penelitian taksonomik (penelitian taksonomik) adalah untuk mempelajari atau menjelaskan gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada saat ini. Penelitian deskriptif juga berupaya untuk menggambarkan beberapa variabel yang berhubungan dengan kesulitan dan elemen yang diteliti, tetapi tidak mempermasalahkan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan satu sama lain (Syahrizal & Jailani, 2023).

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur atau diukur dalam bentuk angka atau bilangan. Data kualitatif dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai data yang hadir atau dikomunikasikan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar (Nasution, 2023).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berasal dari laporan resmi tentang realisasi aggaran pendapatan dan belanja yang ada di dokumen laporan keuangan audited Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun anggaran 2022–2023 dan laporan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun anggaran 2022–2023. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam

mengukur kinerja keuangan berdasarkan prinsip *value for money*. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi penting mengenai alokasi dan penggunaan dana, pencapaian *output* kegiatan, serta tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dipilih untuk menggabungkan data sekunder, ini terdiri dari laporan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk periode 2022–2023 dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja BKPK untuk periode 2022–2023. Data ini digunakan untuk menganalisis aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prinsip *value for money*. Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan melihat dokumen resmi yang relevan daripada meneliti subjek penelitian secara langsung.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan *value for money*. Analisis ini dilakukan dengan menilai tiga aspek utama, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam pengelolaan dana dan kinerja keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan periode 2022 - 2023. Data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi dianalisis untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan *output* yang optimal dengan biaya yang wajar dan tepat sasaran.

1. Pengukuran ekonomis

Cara menghitung rasio ekonomi adalah untuk mengetahui seberapa hemat biaya suatu sektor publik. Untuk melakukan pengukuran ini, diperlukan data dari anggaran pengeluaran dan realisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah sebanding dengan presentase ekonomisnya (Prasetia et al., 2024). Berikut rumus untuk menghitung tingkat ekonomis:

$$\text{Rasio ekonomis} = \frac{\text{Input (Realisasi pengeluaran)}}{\text{Nilai input (Anggaran pengeluaran)}} \times 100\%$$

Kriteria pencapaian kinerja berdasarkan rasio ekonomis dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup ekonomis
60%-80%	Kurang ekonomis
Di bawah 60%	Tidak ekonomis

2. Pengukuran efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi adalah upaya untuk menggunakan masukan tertentu untuk menghasilkan output terbaik atau untuk mendapatkan output terbaik dengan masukan yang lebih murah (Karina & Ramadhani, 2021). Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Kriteria pencapaian kinerja berdasarkan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat efisien

3. Pengukuran efektivitas

Rasio efektivitas adalah pengukuran tingkat keluaran organisasi sektor publik dibandingkan dengan target anggaran pendapatan sektor publik. Ini membutuhkan data anggaran atau realisasi pendapatan (Rahmattullah et al., 2024). Berikut rumus untuk menghitung tingkat efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Outcome (Realisasi pendapatan)}}{\text{Output (Anggaran pendapatan)}} \times 100\%$$

Kriteria pencapaian kinerja berdasarkan rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Di bawah 60%	Tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Anggaran dan Realisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) untuk tahun anggaran 2022-2023 pada laporan keuangan audited BKPK tahun anggaran 2022-2023, serta laporan kinerja BPKP tahun 2022-2023. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan perbandingan anggarannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2022-2023, yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (BKPK, 2023).

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BKPK

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2022	Jumlah	3.599.936.000	157.645.696.288	-	4.379,12
	Pendapatan			154.045.760.288	
	Jumlah	944.048.942.000	713.271.087.138	230.777.854.862	75,55
	Belanja				

2023	Jumlah Pendapatan	1.920.905.000	5.806.572.429	-3.885.667.429	302,28
	Jumlah Belanja	837.810.082.000	803.385.507.258	34.424.574.742	95,89

Sumber: Laporan Keuangan Audited BPKP Tahun Anggaran 2022-2023

Laporan Realisasi Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk tahun anggaran 2022 - 2023 menunjukkan perubahan yang menarik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Pada tahun 2022, estimasi pendapatan sebesar Rp 3.599.936.000 terealisasi sebesar Rp 157.645.696.288, mencapai 4.379,12% dari target, yang menunjukkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Sementara itu, anggaran belanja pada tahun yang sama dianggarkan sebesar Rp 944.048.942.000 dan terealisasi sebesar Rp 713.271.087.138, menyisakan Rp 230.777.854.862 atau 75,55% dari alokasi.

Pada tahun 2023, estimasi pendapatan kembali menunjukkan lonjakan. Dari target Rp 1.920.905.000, realisasi mencapai Rp 5.806.572.429 atau 302,28%, yang menunjukkan peningkatan optimalisasi penerimaan. Belanja pada tahun 2023 juga lebih efisien, dengan anggaran sebesar Rp 837.810.082.000 dan realisasi Rp 803.385.507.258, menyisakan hanya Rp 34.424.574.742 atau setara dengan 95,89% penyerapan anggaran. Data ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja pada tahun 2023.

Analisis Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomi dalam manajemen keuangan adalah kisaran biaya yang dipergunakan sektor publik untuk penyediaan layanan publik. Ini diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan tujuan rumah tangga dan persentase tingkat kinerja mereka. Kinerja keuangan lembaga pengembangan kesehatan dianalisis dari perspektif hubungan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengurukan dengan Menggunakan Rasio Ekonomis pada Tahun 2022-2023

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Ekonomis	Kriteria
2022	713.271.087.138	944.048.942.000	75,55%	Kurang ekonomis
2023	803.385.507.258	837.810.082.000	95,89%	Ekonomis

Sumber: Laporan Keuangan Audited BPKP Tahun Anggaran 2022-2023
 (Data Diolah Penulis, 2025)

$$\text{Rasio ekonomis tahun 2022} = \frac{713.271.087.138}{944.048.942.000} \times 100\% = 75,55\%$$

$$\text{Rasio ekonomis tahun 2023} = \frac{803.385.507.258}{837.810.082.000} \times 100\% = 95,89\%$$

Selama periode anggaran tahun 2022 hingga 2023, tingkat ekonomis dalam pengelolaan belanja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tingkat ekonomis belanja tercatat sebesar 75,55%, yang dikategorikan sebagai kurang ekonomis, karena realisasi belanja belum optimal dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup tajam, dengan tingkat ekonomis mencapai 95,89%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pengelolaan belanja menjadi lebih ekonomis dan sesuai dengan prinsip *value for money*, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan *output* maksimal. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Analisis rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana pengelolaan pendapatan dan belanja dilakukan secara optimal, dengan menilai seberapa besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Jika sebuah lembaga sektor publik dapat memberikan hasil *output* yang maksimal dengan *input* yang minimal, maka lembaga tersebut dianggap efisien. Demikian pula, jika prosedur operasional menggunakan sumber daya yang paling sedikit, maka prosedur tersebut dianggap efisien. Rasio *input* terhadap *output* digunakan untuk mengukur efisiensi. Berikut ini adalah hasil dari analisis rasio efisiensi BPKP tahun 2022-2023:

Tabel 5. Hasil Pengukuran dengan Menggunakan Rasio Efisiensi pada Tahun 2022-2023

Tahun	Output (Rp)	Input (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2022	368.986.619.971	944.048.942.000	39,09%	Sangat efisien
2023	93.130.212.860	837.810.082.000	11,12%	Sangat efisien

Sumber: Laporan Kinerja BPKP Tahun Anggaran 2022-2023 (Data Diolah Penulis, 2025)

$$\text{Rasio efisiensi tahun 2022} = \frac{368.986.619.971}{944.048.942.000} \times 100\% = 39,09\%$$

$$\text{Rasio efisiensi tahun 2023} = \frac{93.130.212.860}{837.810.082.000} \times 100\% = 11,12\%$$

Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan selama periode 2022 hingga 2023 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Pada tahun 2022, tingkat efisiensi tercatat sebesar 39,09%, yang tergolong dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan melalui belanja jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat efisiensi justru menurun drastis menjadi 11,12%, yang juga termasuk dalam kategori sangat efisien. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan, lonjakan belanja yang sebanding mengakibatkan rasio efisiensi sangat ideal. Data ini mencerminkan sumber daya yang digunakan sangat efisien, sehingga prinsip *value for money* tercapai secara optimal.

Analisis rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio antara implementasi pendapatan dan anggaran penjualan. Hasil perhitungan efektivitas data untuk mengimplementasikan pendapatan dan pendapatan otoritas kesehatan 2022-2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas pada Tahun 2022-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2022	157.645.696.288	3.599.936.000	4.379,12%	Sangat efektif
2023	5.806.572.429	1.920.905.000	302,28%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Keuangan Audited BPKP Tahun Anggaran 2022-2023

(Data Diolah Penulis, 2025)

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2022} = \frac{157.645.696.288}{3.599.936.000} \times 100\% = 4.379,12\%$$

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2023} = \frac{5.806.572.429}{1.920.905.000} \times 100\% = 302,28\%$$

Tingkat efektivitas pendapatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan selama tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas

mencapai 4.379,12%, yang berarti realisasi pendapatan jauh melebihi anggaran yang direncanakan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, tingkat efektivitas tetap berada pada angka yang sangat tinggi yaitu 302,28%, dan masih tergolong dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi dalam merealisasikan target pendapatan sangat baik, dengan kemampuan melebihi estimasi yang telah ditetapkan dalam anggaran tahunan.

PEMBAHASAN

Berikut adalah rata-rata hasil dari rasio *Value for Money* pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk periode tahun anggaran 2022-2023:

Tabel 7. Rata-rata Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Value for Money

Rasio	Tahun		Rata-rata Rasio	Kriteria
	2022	2023		
Rasio Ekonomis	75,55%	95,89%	85,72%	Cukup ekonomis
Rasio Efisiensi	39,09%	11,12%	25,11%	Sangat efisien
Rasio Efektivitas	4.379,12%	302,28%	2.340,7%	Sangat efektif

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan tabel 7, analisis *Value for Money* pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun anggaran 2022–2023 menunjukkan hasil yang beragam. Dari sisi rasio ekonomis, rata-rata capaian adalah 85,72%, yang termasuk dalam kategori *cukup ekonomis*. Meskipun pada tahun 2023 sudah menunjukkan kinerja yang ekonomis (95,89%), nilai tahun 2022 yang lebih rendah dan masuk dalam kategori kurang ekonomis (75,55%) menyebabkan rata-ratanya belum masuk kategori optimal. Serapan anggaran pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 karena tahun 2022 adalah masa transisi peralihan dari Badan Litbangkes ke BKPK. Dalam hal ini, Biro KSLN Sekretariat Jenderal Kemenkes bergabung menjadi Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksana rangkaian Ketekuaan G20 dan pada tahun 2022 menggunakan dua DIPA (DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA BKPK) sehingga dalam proses revisi Sapu Jagat selesai lebih banyak menggunakan anggaran DIPA Sekretariat Jenderal sehingga serapan anggaran BKPK tidak optimal. Revisi Sapu Jagat baru diselesaikan pada bulan Agustus 2022 (Astuti et al., 2023). Hasil rata-rata kinerja ekonomis ini mengindikasikan bahwa terdapat ruang perbaikan dalam ekonomi perencanaan anggaran belanja agar lebih hemat biaya.

Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan benar disebut efisiensi. Efisiensi juga dapat digambarkan sebagai hubungan antara input dan output, atau seberapa banyak sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, penghitungan efisiensi tahun 2023 dengan alokasi anggaran program tingkat aselon I per output program, dengan pagu anggaran per volume keluaran, dapat dilihat di lampiran (Astuti et al., 2023). Pada tahun 2022, rasio efisiensi tercatat 39,09%, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,12%. Rata-rata rasio efisiensi selama dua tahun adalah 25,11%, yang dikategorikan sangat efisien berdasarkan pedoman evaluasi. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi tersebut, diketahui bahwa BKPK dengan menggunakan sumber anggaran relatif besar, cukup optimal dalam mencapai target. Faktor yang menyebabkan penurunan efisiensi adalah karena BKPK mampu menghasilkan *output* yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang relatif kecil dibandingkan *input* yang tersedia.

Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan peralatan yang tepat untuk mencapainya disebut efektif. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan keberhasilan pencapaian tujuan dengan keberhasilan pencapaian. Jika pencapaian tujuan atau target proses meningkat, proses tersebut dianggap semakin efektif. Untuk rasio efektivitas, capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata 2.340,7%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan

jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan dalam hal pendapatan dinilai sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BKPK berhasil mengoptimalkan potensi pendapatannya secara signifikan. Keberhasilan ini dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pendapatan jangka panjang serta untuk mendorong peningkatan efektivitas di aspek lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data anggaran dan realisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) untuk tahun anggaran 2022-2023, serta laporan kinerja BPK tahun 2022-2023, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 4.379,12% dari target yang ditetapkan sehingga menghasilkan minus Rp 154.045.760.288, sementara belanja terealisasi sebesar 75,55% dari total anggaran. Meskipun pada tahun 2023 anggaran pendapatan menurun, tetap terjadi minus sebesar Rp 3.885.667.429 dengan persentase sebesar 302,28% dari target, dan belanja juga menunjukkan efisiensi yang lebih baik dengan penyerapan mencapai 95,89%. Hal ini menunjukkan kemampuan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam mengoptimalkan penerimaan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Tingkat ekonomis dalam pengelolaan belanja mengalami peningkatan dari 75,55% pada tahun 2022 menjadi 95,89% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2022 dikategorikan sebagai kurang ekonomis, namun meningkat secara signifikan yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja serta kemampuan dalam mengimplementasikan prinsip *value for money* yang disebabkan karena masa transisi peralihan dari Badan Litbangkes ke BKPK.

Dari sisi efisiensi, dengan rata-rata rasio sebesar 25,11%, BKPK dinilai sangat efisien karena mampu menghasilkan *output* dengan penggunaan sumber daya yang relatif kecil dibandingkan *input* yang tersedia. Meskipun terdapat penurunan efisiensi dari 39,09% pada 2022 dan 11,12% pada 2023, hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi semakin baik, karena semakin kecil angkanya semakin menunjukkan efisiensi yang semakin baik.

Dari segi rasio efektivitas, kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan rata-rata capaian sebesar 2.340,7%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 4.379,12%, sementara pada tahun 2023 mencapai 302,28%. Keberhasilan dalam melampaui target pendapatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan strategi pendapatan telah dilakukan dengan sangat baik. Keberhasilan tersebut mencerminkan kemampuan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam mengoptimalkan perencanaan keuangan jangka panjang, sekaligus menjadi potensi untuk mendukung pencapaian aspek efisiensi dan ekonomis secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan BKPK pada tahun anggaran 2022-2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari aspek efektivitas dan efisiensi, serta cukup baik dari sisi ekonomis. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip *Value for Money* dalam pengelolaan anggaran di BKPK telah tercapai dengan cukup optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. A. M. R., Zubair, N., Rantauwati, E. A., Sukeni, & Muqtadiroh, A. (2023). *Laporan Kinerja BKPK 2023*.
BKPK. (2023). *Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan*.

- Ekayana, I. P., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Konsep Value for Money. *Innovative, Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Habibie, M. M., Nugroho, G. W., & Indrawan, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 7186–7208. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.4434>
- Hairani, Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif, dan Produktif pada Masyarakat Kalijaga Baru. *Valid Jurnal Pengabdian*, 1(3).
- Karina, L. A., & Ramadhani, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2).
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Zulfa, & Nita, Eds.). CV. Harfa Creative.
- Permata Sukma, I., & Muslihat, A. (2023). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dengan Menggunakan Metode Value For Money. *Akuntansi* 45, 4(2), 374–383. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1279>
- Pohan, M., & Halim, R. (2019). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan. *Ekonomica*, 1(5), 10–11.
- Prasetya, D., Saladina, H., & Nurmala. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). 6(2).
- Rahmattullah, M. A., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Rsud Siti Fatimah Az- Zahra Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Pendekatan Value For Money. *Jurnal Revenue*, 5(1).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1).
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2).
- Tampi, A. G. Ch., Kawung, E. J. R., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *E-Journal "Acta Diurna,"* V(1), 3.
- Yuliyanto, W., Sri, W., Rizki, K., & Ari, W. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan "Value For Money" Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas "X" di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233–245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>